

## INFRASTRUKTUR

## Warga Tolak Ganti Rugi Tol Cikopo-Palimanan

CIREBON, KOMPAS – Sejumlah warga Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, keberatan dengan nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan mereka yang terkena pembangunan tol Cikopo-Palimanan. Nilai ganti rugi Rp 200.000-Rp 400.000 per meter persegi itu dinilai terlalu rendah.

"Pekan depan surat gugatan kami kirimkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Cirebon," kata Agus Prayoga, kuasa hukum warga, Selasa (26/3), di Cirebon, sesuai mengikuti pertemuan antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten, dan tim pengadaan tanah tol.

Dari total 8.000 keluarga yang rumah dan tanahnya terkena

pembangunan tol Cikopo-Palimanan, ada 10 keluarga yang hingga kini menolak ganti rugi. Mereka memilih jalur hukum dan menggugat pemerintah agar melakukan penilaian ulang atas nilai tanah dan bangunan.

Penilaian ulang dianggap perlu dilakukan karena harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah pada 2005 sudah tidak sesuai dengan harga dan nilai barang saat ini. Setiap meter persegi tanah warga dihargai berkisar Rp 200.000-Rp 400.000, disesuaikan dengan lokasi dan posisi tanah terhadap akses jalan raya.

Masduki (40), warga yang memiliki tanah seluas 393 meter persegi, mengatakan, nilai tanahnya dihargai Rp 407.000 per meter persegi. Harga itu dinilai masih lebih rendah dibandingkan

dengan tanah salah satu tetangganya yang dijual kepada orang lain beberapa waktu lalu. "Tanah tetangga yang lokasinya tidak di depan jalan raya ternyata laku Rp 600.000 per meter persegi. Tanah saya menghadap langsung jalan raya, semestinya mendapatkan ganti lebih tinggi dari itu," katanya.

Ketua Tim Pengadaan Tanah Tol Cikopo-Palimanan Eten Roseli mengatakan, nilai ganti rugi atas tanah dan bangunan warga itu telah disepakati bersama. Tim penilai yang mengukur tanah itu pada 2005 telah menetapkan harga yang disetujui Bupati Cirebon.

"Dari sekitar 8.000 keluarga, sebanyak 97 persen sudah menerima uang ganti rugi. Artinya, sudah tidak ada persoalan tak-

siran nilai tanah dan bangunan. Kini masih ada 16 keluarga lagi yang belum mengambil uang ganti rugi meski beberapa di antaranya sudah menunjukkan kesepakatan mengambilnya dalam waktu dekat" ungkap Eten.

Pemerintah menyiapkan Rp 7 miliar untuk 16 keluarga yang belum mengambil uang ganti rugi tersebut. Mengenai keberatan sejumlah warga, Eten mengaku, pihaknya menunggu proses hukum. "Nilai tanah dan bangunan sudah disepakati sehingga jika ada keberatan apa pun mengenai itu memang lebih baik diproses melalui hukum," katanya.

Sepanjang proses gugatan hukum berjalan, pemerintah akan tetap meneruskan proyek pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan. (REK)